



SUMBER BERITA

SELASA, 15 MEI 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lengkapi Dokumen ke BPKP

BENGKULU - Rencana Kejaksan Negeri (Kejari) Bengkulu untuk bisa segera menuntaskan perkara dugaan penyelewengan dana tunjangan Beban Kerja (BK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu tahun 2015, tampaknya masih membutuhkan waktu lama.

Pasalnya saat ini pihak auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu masih terus melakukan penghitungan dan audit atas kerugian negara. Untuk itu BPKP Provinsi Bengkulu kembali meminta sejumlah dokumen pendukung dari Kejari Bengkulu dalam penuntasan perkara tersebut.

Kepala Kejaksan Negeri (Kajari) Bengkulu I Made Sudarmawan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan, SH mengungkapkan, adapun dokumen pendukung yang diminta oleh BPKP Provinsi Bengkulu, terkait dengan data jumlah ASN dan honorer di BPKAD tahun 2015 yang telah mengembalikan dan belum mengembalikan selisih tunjangan dana BK yang mereka terima pada tahun itu.

"Saat ini kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh BPKP. Kita ingin segera menuntaskan perkara ini, karena masih banyak perkara lain yang juga harus segera kita tuntaskan. Untuk itu kita akan percepat penyerahan dokumen pendukung yang diminta oleh BPKP ini," ungkap Oka.

Penambahan dokumen penyidikan oleh BPKP ini bukan kali pertama diserahkan oleh Kejari Bengkulu. Sebelumnya Kejari Bengkulu juga telah menyerahkan beberapa dokumen pendukung atas perkara ini, mulai dari dikumen prosedur pencairan tunjangan, hingga aturan hukum terkait tunjangan dana BK. (sly)